

Fostering the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism
In Indonesia – **CONVEY Indonesia**

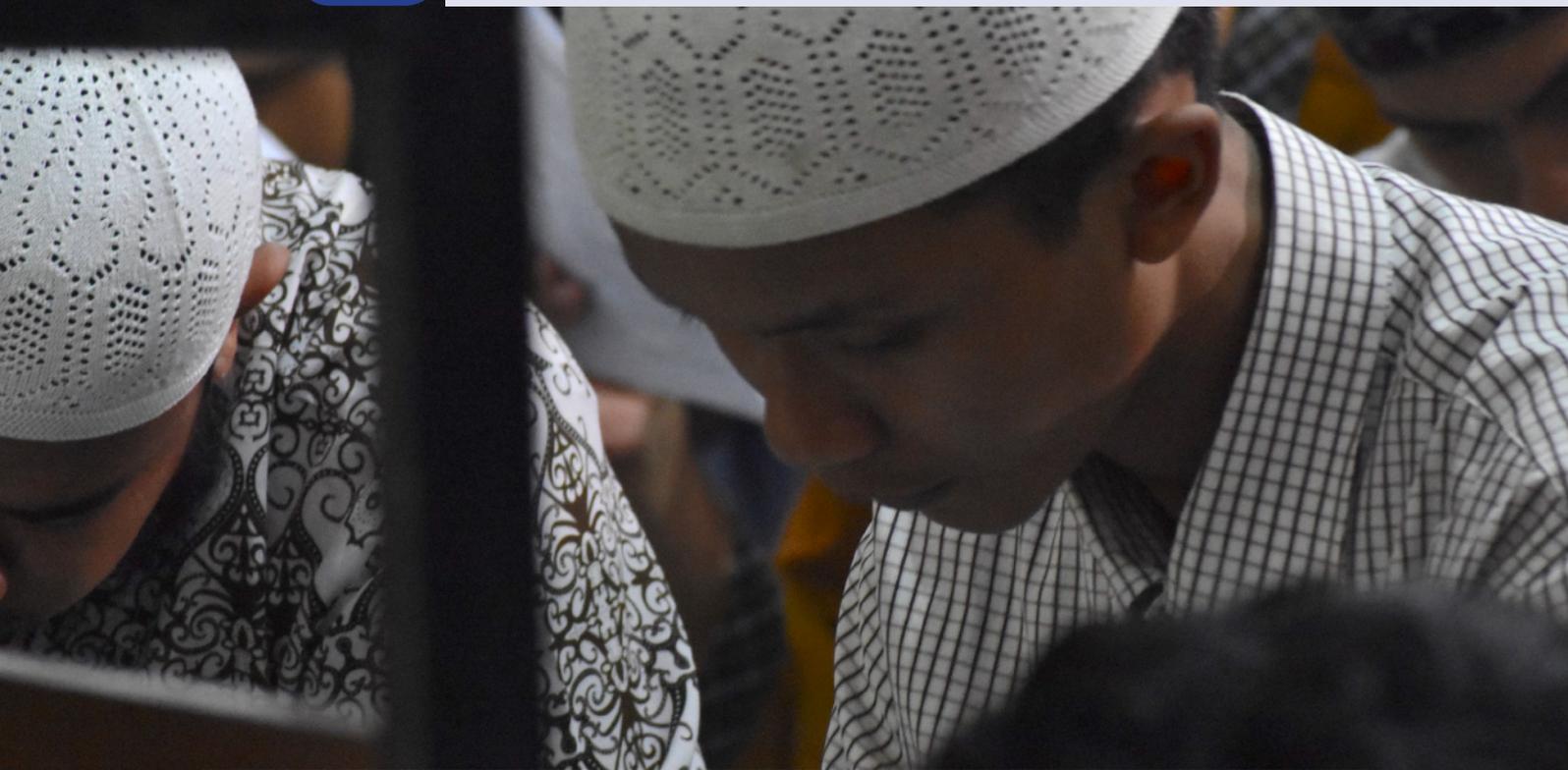
Policy Brief Series

Issue 1 | Vol. 2 | 2019

Policy Brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, berkolaborasi langsung dengan lembaga riset.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi Pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Sikap Keberagaman Guru Madrasah: Pentingnya Memperkuat Moderasi Islam



Pengantar

INTOLERANSI dan radikalisme saat ini menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Berbagai survei menunjukkan tingginya masalah keagamaan ini (LSI, 2016, 2017, 2018; The Wahid Institute, 2106; LIPI, 2018, PPIM UIN Jakarta, 2017). Beberapa peristiwa sosial keagamaan akhir-akhir ini turut membuktikan meningkatnya intoleransi dan radikalisme. Salah satunya, pada 13-14 Mei 2018 terjadi rangkaian pengeboman di tiga rumah ibadah umat Kristen di Surabaya.

Paham intoleran dan radikal juga terlihat menginfiltrasi institusi pendidikan. Intoleransi dan radikalisme masuk melalui buku ajar Pendidikan Agama Islam (Nasuhi, Makruf, Umam, & Darmadi (edt.), 2018), guru agama (Syafuruddin, Darmadi, Umam, & Ropi, 2018), sampai pada kegiatan ekstrakurikuler (Maarif Institute, 2018; PIEC Paramdina, 2018). Peristiwa pawai siswa Taman Kanak-Kanak (TK) di Probolinggo pada Sabtu, 18 Agustus 2018 yang mengenakan pakaian serba hitam, bercadar, dan membawa replika senjata api mempertegas bahwa intoleransi dan radikalisme sudah masuk ke sekolah.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dan agama melekat pada sistem pendidikan negara, mengkaji pemahaman keagamaan guru menjadi kontekstual. Peran guru dibutuhkan untuk menanamkan

nilai-nilai dan paham-paham keagamaan yang moderat dan toleran. Guru yang memiliki pandangan keagamaan yang demikian dan memiliki wawasan kebangsaan dan demokratis yang kuatlah yang bisa mengonter paham-paham keagamaan yang radikal dan intoleran tersebut.

Bagi para pengambil kebijakan, situasi ini perlu direspons secara serius. Sekolah bisa menjadi awal pembentukan sikap intoleran yang kemudian membentuk diskriminasi mayoritas terhadap minoritas. Hal ini tentu ironi bagi Indonesia yang menjunjung prinsip multi-agama dan disebut sebagai negara berpenduduk muslim moderat terbesar di dunia. Studi ini melihat seberapa toleran/intoleran dan radikal/moderat guru-guru madrasah secara nasional mulai dari level Raudlatul Athfal (RA) hingga Madrasah Aliah (MA).

Metode Penelitian

Survei ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. Sampel yang diambil berjumlah 426 guru yang mengajar di bawah Kementerian Agama. Mereka adalah guru semua mata pelajaran mulai dari tingkat Taman-Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Pengambilan data dilakukan selama periode 6 Agustus – 6 September 2018 melalui alat ukur kuesioner self-report computer assisted instruction. Tudi ini melakukan quality control dengan melaksanakan spot check sebanyak 5% dari sampel yang dilakukan oleh tim peneliti PPIM UIN Jakarta dan koordinator Survei provinsi. Selanjutnya, tingkat kepercayaan Survei ini adalah 95%, dengan margin of error sebesar 2,07%

Metode Penelitian



Unit Analisis

Guru Madrasah (RA, MI, MTs, MA)



Sampel

426 Guru Madrasah



Alat Ukur

Self Report-Computer Assisted Instruction (CAI)



Tingkat Kepercayaan

Margin of error 2,07 %
Tingkat kepercayaan 95%



Analisis Data

Statistik Deskriptif Multiple Regression Analysis; Multilevel SEM Analysis



Variabel Utama

Intoleransi Agama; Radikalisme Agama; Faktor-faktor yang Mempengaruhi keduanya



Quality Control

Spot Check 5% sampel dilakukan oleh koordinator Provinsi & Tim PPIM



Durasi Survei

6 Agustus – 6 September 2018

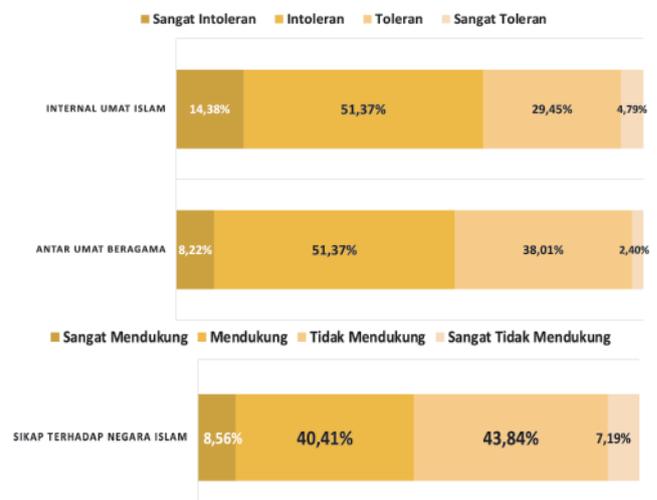
Sikap Keberagamaan Guru Madrasah

Guru memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan karakter siswa. Mereka dituntut bukan hanya memiliki wawasan yang luas, namun juga pemikiran terbuka (open minded), inklusif dan menghargai perbedaan. Namun, survei PPIM 2018 menunjukkan adanya masalah dalam sikap keberagamaan –mencakup opini dan intensi-aksi– guru madrasah.

Sebanyak 61,74 persen guru-guru madrasah memiliki opini yang intoleran terhadap penganut agama lainnya. Misalnya mereka menolak untuk memberikan izin pendirian rumah ibadah non-Muslim di lingkungan mereka tinggal.

Sebanyak 65,75 persen mereka juga memiliki sikap intoleran terhadap perbedaan-perbedaan di internal umat Islam. Contohnya mereka tidak setuju jika kelompok-kelompok minoritas yang dianggap sesat, seperti Syiah dan Ahmadiyah, mendapatkan hak-hak yang sama dalam mengekspresikan keyakinannya. Tingginya sikap intoleran guru ini menjadi ancaman bagi eksistensi bangsa Indonesia yang majemuk.

Gambar 1: Opini Toleransi dan Sikap terhadap Negara Islam



Data survei memperlihatkan bahwa mereka accepting the differences (mengakui perbedaan) namun belum bisa embracing the difference (“merangkul” perbedaan). Dalam relasi sosial, 79 persen guru tidak mempersoalkan jika pengikut agama lain mengadakan kegiatan keagamaan (seperti kebaktian) di kediaman mereka. Namun, mereka menolak dengan tegas hak-hak public kelompok di luar mereka seperti hak untuk dipilih menjadi pejabat publik.

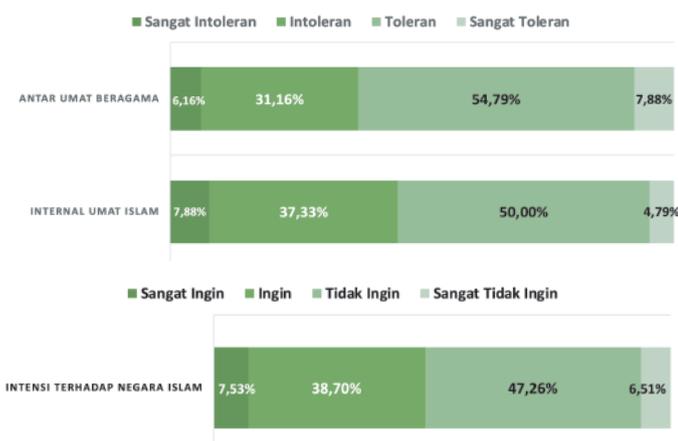
Guru menolak jika pejabat publik berasal dari agama yang berbeda (baik kepala dinas, maupun pejabat publik lainnya adalah non-Muslim). Lebih jauh, 56 persen bahkan tidak setuju jika non-muslim mendirikan sekolah berbasis agama mereka di lingkungan mereka tinggal. Gejala ini menunjukkan bahwa meskipun mereka menyadari ada perbedaan

agama, namun mereka belum bisa hidup bersama perbedaan tersebut.

Studi ini juga melihat komitmen guru madrasah terhadap negara bangsa Indonesia. Dalam dua dasawarsa terakhir menguat kembali gerakan-gerakan keagamaan yang ingin mengganti NKRI menjadi suatu negara teokrasi (khilafah). Studi ini menunjukkan bahwa 48,97% guru madrasah mendukung pendirian negara Islam. Data ini menunjukkan bahwa guru madrasah terpapar ideologi keagamaan radikal ingin mengganti konstitusi negara menjadi sistem berdasarkan Islam.

Selain sikap keberagaman, lebih jauh studi ini melihat intensi (seberapa ingin untuk melakukan) guru terhadap toleransi internal umat Islam dan antar umat beragama. Berbeda dengan sikap keberagaman, pada level intensi mereka cenderung lebih toleran. Sebanyak 62,67 persen mereka toleran terhadap umat agama lain. Sedangkan 54,77 persen toleran terhadap perbedaan-perbedaan (khilafah) di internal umat Islam. Data ini menunjukkan bahwa walaupun sikap mereka cenderung intoleran, namun intensi toleransi guru menunjukkan cenderung lebih toleran.

Gambar 2: Intensi Toleransi dan Intensi terhadap Negara Islam



Mengapa Intoleran dan Radikal?

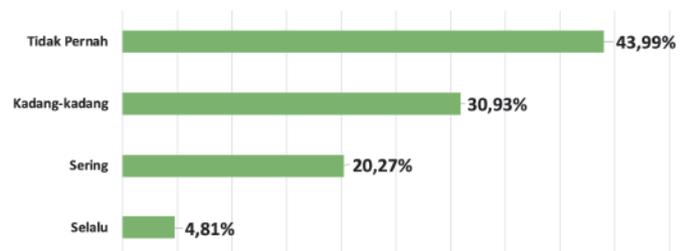
a. Keberagaman Zonder Keragaman

Kurangnya interaksi guru madrasah dengan pemeluk agama lain menjadi alasan mengapa mereka cenderung intoleran. Mereka hidup di dalam komunitas yang homogen. Di madrasah,

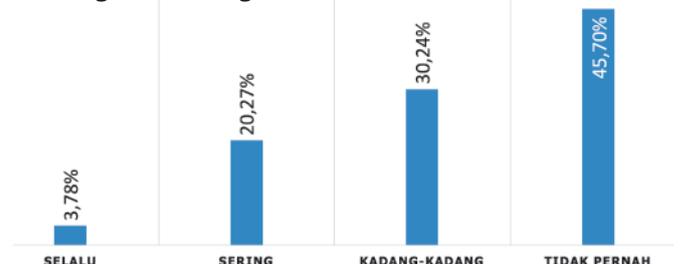
guru hanya mengajar siswa beragama Islam dan hanya berinteraksi dengan guru lain yang juga Muslim. Kurangnya pengalaman hidup yang beragam ini, terutama dengan non-Muslim, menjadi pemicu sikap intoleran dan radikal guru.

Kurangnya pengalaman hidup guru madrasah terhadap keberagaman di sekolah berimplikasi pada pengajaran di kelas. Mereka tidak menjadikan dialog atau interaksi antar umat beragama menjadi bagian penting dalam pendidikan. Data survei menunjukkan bahwa sebanyak 74,92 persen guru menyatakan tidak pernah dan/atau kadang-kadang mengajarkan siswa agar mampu berdialog dengan orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda. Sebanyak 75,94 persen juga menyatakan tidak pernah dan/atau kadang-kadang menekankan agar siswa dapat bekerja sama dengan non-Muslim.

Kemampuan berdialog antar siswa yang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda, baik sesama muslim atau dengan agama lain.



Kerjasama dengan non-muslim baik individu tau Lembaga dalam kegiatan sosial.



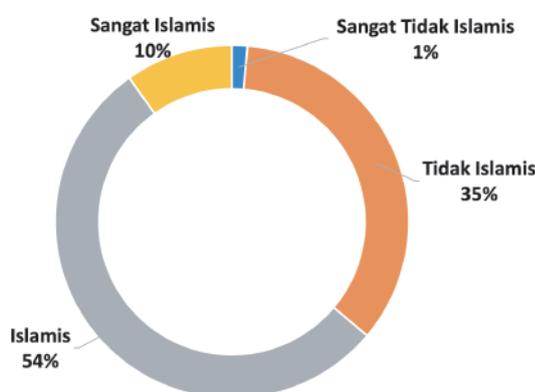
b. Pandangan Keberagaman

Temuan survei menunjukkan bahwa pandangan keagamaan yang Islamis menjadi faktor krusial yang menyumbangkan intoleransi dan radikalisme guru. Dalam studi Ilmu sosial, Islamisme merupakan sebuah pandangan keagamaan yang menekankan pada formalisasi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa-

sa dan negara, serta menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk: sosial, politik, dan ilmu pengetahuan (Roy, 1994). Pandangan keagamaan seperti ini cenderung menegasikan adanya keragaman sistem nilai lain dalam masyarakat. Sebagai sebuah masyarakat yang plural secara agama, etnis, dan budaya, pandangan Islamis ini dapat merusak kerukunan antar umat beragama.

Survei memperlihatkan bahwa sebanyak 64 persen guru madrasah memiliki pandangan Islamis. Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya sikap intoleransi dan radikal guru sejalan dengan besarnya pandangan Islamis guru madrasah. Salah satu dampak dari pemahaman simplistik tentang "Islam yang paling sempurna dan telah mencakupi semua bidang kehidupan" adalah terbentuknya klaim-klaim merasa paling benar dan sikap cenderung menolak yang lainnya. Termasuk respons yang negatif terhadap pluralitas ide atau gagasan yang sejatinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari sikap untuk tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Pandangan yang absolutis juga dapat membawa dampak rendahnya penerimaan terhadap pendapat-pendapat lain yang berbeda, baik berlaku terhadap pihak luar (external) maupun dalam sesama umat Islam sendiri.

Pandangan Islamis Guru



40,36% GURU

setuju bahwa Seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al Quran sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber



82,77% GURU

setuju bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi segala persoalan masyarakat.

Dampak negatif lainnya dari pandangan Islamis ditandai dengan rendahnya penerimaan terhadap sumber-sumber pengetahuan lain dan kurang dapat menerima perbedaan penafsiran/pendapat. Sebanyak 40,36 persen guru misalnya menyebutkan bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al Quran sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat. Bahkan 82,77 persen berpendapat bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi segala persoalan masyarakat.

Dalam konteks upaya memperkuat institusi pendidikan sebagai medium pertukaran gagasan yang terbuka dan kompetitif, kecenderungan tertutup pada dinamika perbedaan pendapat serta sumber-sumber pengetahuan lainnya yang berasal dari berbagai penjuru, akan menjadi penghalang serius bagi lahirnya generasi cendekia yang bersikap kritis dan terbuka. Sebab, anak didik diarahkan untuk memahami persoalan lebih secara hitam putih serta sangat simplistik. Tidak terkecuali dalam pembentukan wawasan keagamaan, sikap tertutup dan merasa paling benar hanya akan memproduksi sikap serta perilaku keagamaan yang picik dan sudah pasti intoleran.

c. Kesejahteraan Guru

Faktor selanjutnya yang mendorong radikalisme guru adalah tingkat kesejahteraan guru. Data menunjukkan bahwa semakin rendah penghasilan mereka, maka semakin tinggi opini dan intensi-aksi radikal mereka. Data ini menunjukkan bahwa guru dengan pendapatan rendah lebih rentan terpapar oleh ide-ide keagamaan radikal.

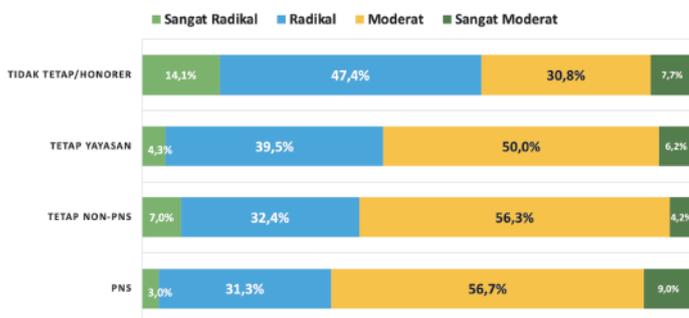


Penghasilan

≤ 1.000.000 : 26,97%
 1.000.000-2.500.000 : 25,27%
 2.500.000-5.000.000 : 33,09%
 5.000.000-7.500.000 : 10,33%
 ≥ 7.500.000 : 4,34%

*Rupiah

Tingkat penghasilan atau kesejahteraan guru tidaklah terlepas dari status kepegawaian mereka. Guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) cenderung lebih moderat daripada guru honorer. Fakta ini menunjukkan bahwa peran negara dalam memberikan kesejahteraan guru madrasah menjadi penting. Dengan memberikan perhatian terhadap penghasilan guru madrasah honorer, kedekatan psikologis (affection) dan kepercayaan (trust) guru terhadap pemerintah menjadi menguat. Kondisi tersebut sejatinya dapat menangkal guru dari ide-ide radikal, mengganti sistem, yang umumnya disebabkan oleh perasaan ketidakadilan (feeling injustice).



Jika masalah ini tidak segera direspons, dapat mendorong guru non-PNS bisa menjadi radikal. Menyelesaikan isu kesejahteraan menyumbang penyelesaian isu radikalisme.

Rekomendasi

Jika masalah ini tidak segera direspons, dapat mendorong guru non-PNS bisa menjadi radikal. Menyelesaikan isu kesejahteraan menyumbang penyelesaian isu radikalisme.

1. Penguatan wawasan moderat untuk guru di lingkungan madrasah. Termasuk di dalamnya penanaman dan penguatan nilai-nilai universal Islam yang rahmatan lil alamin kepada para guru madrasah. Penguatan ini bisa dilakukan melalui pendidikan guru di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan), PPG (Pendidikan Profesi Guru), dan pelatihan guru.

2. Meningkatkan keterlibatan guru dalam program-program yang bersifat multikultural/multi-agama. Program ini bertujuan memupuk saling pengertian, rasa solidaritas bersama dan mengurangi rasa saling curiga.

3. Meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Terutama kepada mereka yang statusnya sebagai guru honorer. Kebijakan ini penting untuk memastikan kedekatan psikologis (affection) dan kepercayaan (trust) mereka terhadap negara, sekaligus bisa menjadi benteng dalam menangkal ide-ide keagamaan radikal yang mereka terima.

Profil PPIM UIN Jakarta

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta merupakan lembaga penelitian otonom di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM UIN Jakarta didirikan pada tahun 1994 dan secara berkesinambungan melakukan penelitian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu kehidupan dan pendidikan keagamaan di Indonesia.

Bersama UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta sejak tahun 2017 melakukan program Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) Indonesia, sebuah program yang bertujuan membangun perdamaian di Indonesia berbasis pada potensi pendidikan agama dengan menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan kekerasan di kalangan generasi muda. Selain itu, sejak berdirinya sampai saat ini, PPIM UIN Jakarta juga menerbitkan Jurnal Studia Islamika, sebuah jurnal bereputasi internasional yang berfokus pada kajian Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.



**Fostering Tolerant Religious Education to
Prevent Violent Extremism in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



*Empowered lives.
Resilient nations.*